

PERANAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS

(The Roles of Village Community Empowerment Workers (KPMD) and Community Participation in National Program of Rural Community Empowerment (PNPM-MP) in Wonosobo Subdistrict of Tanggamus Regency)

Andika Rismayanti Hadi, Irwan Effendi, Tubagus Hasanuddin

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, e-mail: andika.rismayanti@yahoo.com

ABSTRACT

The objectives of this research were to find out: 1) the roles of Village Community Empowerment Workers (KPMD) in National Program of Autonomous Village Community Empowerment (PNPM-MP); 2) community participation levels in National Program of Autonomous Village Community Empowerment; and 3) correlation between the roles of the KPMD in the PNPM-MP and their participation. This research was conducted from July to August 2012. Respondents were 12 Workers of Village Community Empowerment and 60 poor families taken by using disproportional stratified random sampling. This was a survey research. The correlations between variables were tested by using Rank Spearman. The results showed that: 1) level of the roles of the KPMD was in high category in facilitating village meetings, ensuring steps in program activities, encouraging and ensuring program principles and policy implementations, following monthly meetings with Field Assistant, and encouraging community to participate in conducting activities. However, level of role of Village Community Empowerment Worker (KPMD) in disseminating and socializing programs were in middle category; 2) the community participation level on planning development, making decision, monitoring, evaluating program activity, and taking advantages of development results were in high category. However, the community participation level in the program were low category and the community participation level in providing autonomous resources were low; 3) there was a significant correlation between the roles of KPMD and community participation level in the PNPM-MP program in Wonosobo sub district of Tanggamus Regency.

Keywords: Community Participation, KPMD, PNPM-MP, Roles

PENDAHULUAN

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Program ini digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan program pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarasanya adalah masyarakat perdesaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Lampung, 2010).

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat perdesaan melalui pinjaman modal, pembinaan kelompok masyarakat, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat baik pada proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dalam program-program pembangunan sarana dan prasarana. Pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Rekapitulasi lokasi dan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Perdesaan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2007-2010, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 dapat dilihat sebaran atau alokasi dana bantuan langsung mandiri (BLM) PNPMMandiri Perdesaan per kabupaten di Provinsi Lampung. Dana BLM PNPMMandiri Perdesaan yang diterima oleh Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun meningkat.

Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Perdesaan tersebut sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah dan melihat kelayakan kegiatan yang ditawarkan serta mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi program yang dijalankan di daerah tersebut. Dana tersebut di atas di alihkan ke beberapa kecamatan yang ada di Provinsi Lampung. Data lokasi dan alokasi BLM program PNPMMandiri Perdesaan per kecamatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 2

Pada tahun 2010, Kecamatan Wonosobo mendapatkan dana BLM sebesar Rp 3.000.000.000,- yang berasal dari APBD dan APBN (Tabel 2). Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PNPMMandiri Perdesaan di 23 pekon yang ada di Kecamatan Wonosobo. Dana tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan

dengan kecamatan yang lain mengingat kecamatan lain mendapatkan jumlah dana yang sama dengan jumlah pekon yang lebih sedikit.

Keberhasilan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada pada program PNPMMandiri Perdesaan tidak lepas dari peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD dituntut mempunyai kemampuan teknis dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan rumah tangga miskin. Kecamatan Wonosobo memiliki dua orang KPMD per pekon. KPMD yang terpilih mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPMMandiri Perdesaan kepada masyarakat desa serta memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertugas memfasilitasi atau memandu seluruh anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan PNPMMandiri Perdesaan di desa secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Tabel 1. Rekapitulasi lokasi dan alokasi dana BLM PNPMMandiri Perdesaan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2007-2010

Kabupaten	Jumlah alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Perdesaan (Rp. X100 juta)			
	2007	2008	2009	2010
Lampung Barat	1.4	14.7	28.3	45.2
Tanggamus	1.8	18.7	22.7	24.7
Lampung Selatan	2.3	20.7	41.0	44.0
Lampung Timur	2.2	11.7	21.6	34.2
Lampung Tengah	1.9	14.0	31.8	41.7
Lampung Utara	1.1	13.7	33.7	22.2
Way Kanan	1.0	11.0	18.0	21.5
Tulang Bawang	2.2	13.0	20.5	17.0
Tulang Bawang Barat	-	-	-	6.2
Pesawaran	-	-	6.9	9.0
Bandar Lampung	-	-	-	-
Metro	-	-	-	-
Mesuji	-	-	-	11.0
Pringsewu	-	-	-	9.0
Lampung	13.9	117.7	224.5	277.0

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, 2011

Tabel 2. Data lokasi dan alokasi BLM PNPMP per kecamatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010

Kecamatan	Jumlah Desa	BLM (Rp. x juta)		Jumlah
		APBD	APBN	
Air Naningan	9	450,0	1.800,0	2.250,0
Bandar Negeri Semuong	10	600,0	2.400,0	3.000,0
Bulok	9	600,0	2.400,0	3.000,0
Cukuh Balak	18	600,0	2.400,0	3.000,0
Kelumbayan Barat	6	600,0	2.400,0	3.000,0
Pugung	25	600,0	2.400,0	3.000,0
Pulau Panggung	18	450,0	1.800,0	2.250,0
Talang Padang	19	450,0	1.800,0	2.250,0
Wonosobo	23	600,0	2.400,0	3.000,0
Jumlah	137	4.950,0	19.800,0	24.750,0

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, 2011

Peranan KPMD merupakan mekanisme yang sangat penting dalam PNPMP-Mandiri Perdesaan. KPMD tidak hanya dituntut mempunyai kemampuan teknis dalam penulisan usulan tetapi juga dituntut untuk dapat merangkul masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program. Kerjasama yang baik antar semua pelaku program PNPMP-Mandiri Perdesaan akan mempercepat pembangunan desa-desa.

Kegiatan pembangunan yang ada pada program PNPMP-Mandiri Perdesaan merupakan hasil keputusan dari musyawarah setiap pekon. Pelaksanaan kegiatan program PNPMP-Mandiri Perdesaan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Keberhasilan program PNPMP-Mandiri Perdesaan bergantung pada besarnya tingkat partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku PNPMP-Mandiri Perdesaan. Tanpa adanya dukungan melalui partisipasi dari masyarakat maka program pemberdayaan tersebut tidak akan berhasil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, (3) Hubungan antara tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang sedang mengembangkan salah satu program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan jumlah pekon terbanyak di Kabupaten Tanggamus setelah Kecamatan Pugung, yakni sebanyak 23 pekon. Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu staf di Badan Koordinator PNPMP Provinsi Lampung menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Wonosobo tergolong lebih aktif dibanding masyarakat Kecamatan Pugung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2012.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 12 orang KPMD dan 1.535 orang masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran dari program PNPMP-MP. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*Purposive*) yakni 6 pekon dari 23 pekon yang ada di Kecamatan Wonosobo dengan pertimbangan bahwa pekon tersebut terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak dan mendapatkan dana swadaya dari masyarakat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Jumlah masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) dan jumlah swadaya masyarakat masing-masing pekon di Kecamatan Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah rumah tangga miskin (RTM) dan jumlah swadaya masyarakat per pekan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 2010

Pekon	Rumah Tangga Miskin (KK)	Jumlah Swadaya (Rp)
Sridadi	296	2.330.000
Way Panas	283	3.185.000
Soponyono	261	1.285.000
Banjarsari	247	2.919.000
Kunyayan	232	1.635.000
Dadisari	216	1.185.000
Jumlah	1.535	12.539.000

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan (UPK), 2011

Selanjutnya dari pekan terpilih ditetapkan jumlah sampel dari masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diambil dengan teknik pengambilan Sampel Acak Tidak Proporsional menurut Stratifikasi yakni pengambilan sampel pada setiap pekan diambil dengan persentase yang berbeda. Pengambilan sampel untuk KPMD dan masyarakat RTM dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa dari tiap pekan diambil 2 responden/sampel KPMD dan 10 sampel Rumah Tangga Miskin (RTM). Jumlah keseluruhan sampel yakni 72 orang yang berasal dari 6 pekan di Kecamatan Wonosobo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, dinas, instansi dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ini.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga ada hubungan nyata antara tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan tingkat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif, sedangkan pengujian hipotesis digunakan analisis statistik nonparametrik dengan uji korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 1997) dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah sampel Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Pekon	Sampel KPMD	Sampel RTM
Sridadi	2	10
Way Panas	2	10
Soponyono	2	10
Banjarsari	2	10
Kunyayan	2	10
Dadisari	2	10
Jumlah	12	60

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n di^2}{n^3 - n} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:
 r_s = Koefisien korelasi *Rank Spearman*
 n = Jumlah Responden
 di = Perbedaan setiap peringkat

Rumus r_s ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini akan dilihat korelasi (keceratan hubungan) antara dua variabel yakni variabel X dan variabel Y. Pengujian dilanjutkan untuk menjaga tingkat signifikansi pengujian bila terdapat rank kembar baik pada variabel X maupun pada variabel Y sehingga dibutuhkan faktor koreksi t (Siegel, 1997) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n di^2}{n^3 - n} \dots\dots\dots (2)$$

$$\sum X^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x \dots\dots\dots (3)$$

$$\sum Y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y \dots\dots\dots (4)$$

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}} \dots\dots\dots (5)$$

$$T = \frac{t^3 - t}{12} \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:
 $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat variabel X yang dikoreksi
 $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat variabel Y yang dikoreksi

- ΣT_x = Jumlah faktor koreksi variabel X
- ΣT_y = Jumlah faktor koreksi variabel Y
- T = Faktor koreksi
- t = Banyaknya observasi berangka sama pada peringkat tertentu
- n = Jumlah sampel

HASIL PENELITIAN

Tingkat Peranan KPMD pada Program PNPMP

Robert Lawang dalam Mardikanto (1991) berpendapat bahwa peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi, seperti perusahaan, keluarga, komunitas, sekolah dan lain-lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam setiap peran ada hak dan kewajiban, seperti halnya juga kita lihat dalam status. Berdasarkan pada konsep ini, kewajiban Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah memfasilitasi dan memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPMP di desanya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, tingkat peranan KPMD pada program PNPMP dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat peranan KPMD pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

No	Tingkat Peranan KPMD	Selang (Skor)	Kelas	%
1.	Memfasilitasi musyawarah	14,02 – 18	Tinggi	91,8
2.	Menyebarkan dan mensosialisasikan program	6,68 – 9,35	Sedang	66,7
3.	Memastikan terlaksananya program	9,36 – 12,0	Tinggi	100
4.	Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan program	4,68 – 6,00	Tinggi	100
5.	Mengikuti pertemuan bulanan dengan PL	7,02 – 9,00	Tinggi	91,7
6.	Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan	9,36 – 12,0	Tinggi	100

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat peranan KPMD seperti memfasilitasi musyawarah-musyawarah, memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan program, mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan program, mengikuti pertemuan bulanan dengan PL, dan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan berada pada klasifikasi tinggi yakni 91,67-100%, sedangkan tingkat peranan KPMD dalam menyebarkan dan mensosialisasikan program termasuk dalam klasifikasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa KPMD sudah menjalankan peranannya dengan baik.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program PNPMP

Partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP adalah tingkat keterlibatan masyarakat rumah tangga miskin dalam setiap tahapan kegiatan PNPMP-MP. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari 5 indikator yaitu tingkat partisipasi dalam perencanaan, tingkat partisipasi dalam memberikan swadaya, tingkat partisipasi dalam pelaksanaan, tingkat partisipasi dalam memonitoring dan evaluasi, dan tingkat partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, tingkat partisipasi masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat partisipasi masyarakat pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Tingkat Partisipasi Masyarakat	Selang (Skor)	Kelas	(%)
Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	11,68 – 15	Tinggi	91,67
Memberikan swadaya	2,00 – 3,33	Rendah	58,33
Pelaksanaan program	5,01 – 7,01	Sedang	75,00
Monitoring dan mengevaluasi program	7,02 – 9,00	Tinggi	100,00
Memanfaatkan hasil pembangunan	7,02 – 9,00	Tinggi	83,33

Tabel 7. Hasil pengujian tingkat peranan KPMD (Variabel X) dan tingkat partisipasi masyarakat (Variabel Y) dalam program PNPMP-MP

Variabel X	Variabel Y	rs	t-hitung	t-tabel	
				$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$
Tingkat peranan KPMD dalam program PNPMP-MP	Tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP	0,530*	3,729*	2,179	3,055

Sumber : Analisis data sekunder menggunakan SPSS 16

Keterangan :

rs = Rank Spearman

* = Berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 95% (t tabel = 2,179)

Hubungan antara Tingkat Peranan KPMD dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program PNPMP-MP

Penelitian tentang tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan tingkat partisipasi masyarakat pada program PNPMP-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, digunakan analisis hubungan variabel X (tingkat peranan KPMD) dan variabel Y (tingkat partisipasi masyarakat). Hasil pengujian terhadap tingkat peranan KPMD yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada program PNPMP-MP dapat dilihat pada Tabel 7.

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat peranan KPMD dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP diterima pada tingkat kepercayaan 95 %. Hubungan antara tingkat peranan KPMD dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP ditunjukkan dengan nilai rs sebesar 0,530 dengan t-hitung yaitu sebesar 3,729 yang lebih besar dari nilai t-tabel yaitu sebesar 2,179. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat peranan KPMD berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP.

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa KPMD hampir kesemuanya berpendidikan tinggi sehingga dapat dengan mudah memahami pedoman teknis operasional program PNPMP-MP. Peranan diartikan sebagai suatu tindakan ataupun perilaku yang harus dilaksanakan seseorang yang menempati suatu posisi tertentu dalam keadaan sosial (Effendi, 2007). Hal ini bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa KPMD selalu memberikan bimbingan berupa arahan

kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana fisik, semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Setiap KPMD mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Semakin baik peranan KPMD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program PNPMP-MP, maka masyarakat akan terpacu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi secara aktif dalam program PNPMP-MP. Salah satunya adalah ikut serta merencanakan dan ikut dalam pengambilan keputusan, serta ikut dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Tingkat peranan KPMD dalam program PNPMP-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi, namun tingkat peranan KPMD dalam menyebarluaskan dan mensosialisasikan program termasuk dalam kategori sedang. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP yakni partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan termasuk dalam kategori tinggi, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program PNPMP-MP termasuk dalam kategori sedang dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan swadaya termasuk dalam klasifikasi rendah. 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat peranan KPMD dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPMP-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. 2010. *Pedoman Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta Pusat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung. 2010. *Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) T.A 2011*. Bandar Lampung

Effendi, Irwan. 2007. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Program Pemberdayaan*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Unit Pelaksana Kegiatan. 2010. *Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)*. Wonosobo

ABSTRACT

Abstrak ditulis oleh pengarang. Abstrak ini memuat informasi tentang isi pokok dari tulisan yang bersangkutan. Abstrak ini harus ringkas, padat, dan jelas. Panjang abstrak biasanya berkisar antara 5% sampai 10% dari keseluruhan tulisan. Abstrak ini harus dapat berdiri sendiri sebagai dokumen yang utuh.

Keywords: ...

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kegiatan sosial perikanan yang berkembang pesat yang mendapat perhatian khusus pemerintah adalah kegiatan yang ditunjukkan dalam pedoman teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel tersebut terhadap variabel terikat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel tersebut terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial perikanan yang lebih efektif dan efisien. Saran yang dapat diberikan adalah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di daerah pedesaan.

Tabel 1. Produksi, luas panen, dan produktivitas ikan air tawar di Provinsi Lampung 2004-2010

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2004	282.430	2.002.000	7,1
2005	318.104	2.204.000	6,9
2006	318.949	2.721.000	8,5
2007	329.045	2.500.000	7,6
2008	341.217	2.677.000	7,8
Rata-rata	314.557	2.335.000	7,4

berisi data produksi ikan air tawar dan luas panen yang diperoleh dari laporan tahunan dan data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.



Gambar 1. Grafik hubungan produksi dan luas panen ikan air tawar

